CATATAN OMBUDSMAN KEPRI TERHADAP PELAKSANAKAAN TAHAP VERIFIKASI SPMB TAHUN 2025

Senin, 30 Juni 2025 - kepri

B/014/HM.04-05/VI/2025
Sabtu, 28 Juni 2025
Batam - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Seperti, beberapa waktu lalu, Ombudsman Kepri telah melakukan observasi lapangan dan pengawasan langsung pada proses verifikasi oleh panitia di empat lokasi posko verifikasi bersama di Kota Batam yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yakni Posko SMAN 3, SMKN 7, SMAN 5 dan SMKN 1. Selain itu, Ombudsman Kepri pun turut melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batam.
Dari hasil pengawasan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, pelaksanaan verifikasi berjalan dengan lancar. "Dari hasil pengawasan kami, hingga saat ini SPMB masih berjalan dengan lancar dan baik," ungkapnya (26/06/2025) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.
Meskipun demikian, ia tak memungkiri masih menemukan hal-hal yang menjadi catatan Ombudsman Kepri terhadap pelaksanaan verifikasi SPMB Tahun 2025.
Pertama, terkait adanya petugas verifikator yang memiliki perbedaan pemahaman/ persepsi dalam melakukan pengecekan dan validasi dokumen sehingga dapat berpotensi terjadinya penyimpangan prosedur maupun tidak kompeten dan kelalaian dalam melakukan proses verifikasi dan validasi yang mengakibatkan calon murid kehilangan kesempatan untuk memperoleh status terverifikasi.
"Petugas verifikator seharusnya berpedoman kepada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan dan berkonsultasi kepada ketua panitia dan tim maupun kepada Dinas Pendidikan apabila terdapat keraguan dalam melakukan validasi dokumen," tutur Lagat.
Kedua, terkait beberapa ketentuan dalam jukni pada Dinas Pendidikan yang belum terakomodasi berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 ataupun bertentangan.
"Contohnya, seperti menetapkan Kartu Keluarga (KK) di bawah 1 tahun sebagai syarat pendaftaran utama tidak mengakomodir ketentuan Pasal 18 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 mengenai ketentuan khusus KK di bawah 1 tahun tanpa perubahan domisili apabila terjadi penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga/ pindah, dan hilangnya KK," ungkap Lagat.

Siaran Pers

